



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Juni 2020

Halaman: 2

KOMISI B DPRD PERKIRAKAN HANYA SAMPAI SEPTEMBER

Kas Daerah Kota Yogya Menipis

UMBULHARJO (MERAPI) - Pendapatan dalam APBD Kota Yogyakarta per Mei 2020 dinilai hanya mampu bertahan sampai September. Jika tidak ada tambahan penerimaan maka akan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan dan program pemerintah kepada masyarakat.

"Dalam posisi keuangan riil total kas daerah, bila tidak ada penambahan penerimaan, jalannya roda pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam urusan wajib saja hanya bisa bertahan sampai 4 bulan yaitu sampai September 2020," kata anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto, Kamis (11/6).

Fokki mendasarkan pemerhatian dari hasil paparan pendapatan Pemkot Yogyakarta dalam rapat Komisi B dengan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Tercatat, realisasi penerimaan pajak per Mei 2020 sebanyak Rp 131,9 miliar atau sekitar 29 persen. Di samping itu Pemkot Yogyakarta juga mendapatkan penerimaan dari dana perimbangan sebesar Rp 48,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) tiap bulan Rp 48,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 57,7 miliar dan retribusi daerah Rp 177,7 juta. Menurutnya, posisi riil keuangan Pemkot Yogyakarta

adalah Rp 212,8 miliar.

"Bila situasi pandemi Covid-19 tidak ada progresif kebijakan dari pemerintah pusat ataupun DIY dalam bergerak ke kehidupan new normal, maka pergerakan ekonomi juga hanya jalan di tempat. Akibatnya fungsi dari pemerintah sebagai pelayanan publik juga terpengaruh," tegasnya.

Menurutnya penurunan pendapatan Pemkot Yogyakarta karena masa pandemi Covid-19 di mana situasi perekonomian masyarakat bergerak sangat lambat. Disamping itu tahun ini ada permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan karena kenaikan nilai jual objek pajak tahun ini di Yogyakarta. Disampaikan total per 8 Juni ada 5.660 wajib pajak

yang mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan PBB,

Menanggapi hal itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, dalam melihat keuangan tidak bisa parsial dalam kondisi riil yang ada di kas daerah. Pasalnya kas akan berkembang terus lantaran masih ada pendapatan yang diterima Pemkot Yogyakarta setiap harinya.

"Jadi kalau hanya berdasarkan uang kas yang saat ini dipegang, memang sebesar itu. Tapi kan selalu ada progres perkembangan setiap harinya. Masih ada pendapatan yang didapatkan per harinya dari pembayaran pajak seperti pajak restoran, penerangan jalan umum, PBB dan retribusi," terang Heroe.

Dia menyebut masih ada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, yaitu Dana Insentif Daerah, DAU, DAK dan dana bagi hasil dan sebagainya. Selain itu masih ada dana dari Pemda DIY. "Juli kami akan lakukan rasionalisasi anggaran lagi. Terutama ketika ada ketentuan baru dari pemerintah pusat. Aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergeliat lagi, tentu dengan protokol kesehatan," imbuhnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005